

Dampak Strategi Suriah Menghadapi Israel terhadap Pergolakan di Suriah

Windratmo Suwarno

*Setditjen Hukum dan Perjanjian Internasional,
Kementerian Luar Negeri*

ABSTRAK

Pergolakan yang terjadi Suriah merupakan dampak dari strategi Suriah dalam menghadapi konflik dengan Israel. Kerusuhan yang terjadi di Suriah bukan ditujukan untuk membuat negara demokrasi melainkan untuk menggantikan posisi presiden. Amerika Serikat dan sekutunya telah berhasil memutuskan hubungan diplomatik antara Suriah dan Turki. Tujuan utama dari Amerika Serikat dan Liga Arab adalah untuk mengganti rezim di Suriah untuk memudahkan pengusiran pasukan militer Hizbullah di Libanon yang didukung oleh Iran. Kegagalan dari Amerika Serikat dan pasukannya dalam mengajukan intervensi kemanusiaan di PBB telah menggerakkan penyerangan Israel ke Suriah. Serangan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kelompok oposisi teroris dalam melumpuhkan pemerintahan Suriah. Kelumpuhan rezim Suriah diharapkan mampu mengurangi pengaruh strategi Iran terhadap Suriah untuk memutuskan dukungan Iran terhadap Hizbullah yang difasilitasi oleh Suriah karena nuklir Iran dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap Israel.

Kata-kata kunci: *Suriah, Geopolitik, Israel, Hizbullah, Timur Tengah, Iran, Libanon.*

Upheaval in Syria is an impact of Syria's strategy in facing conflict with Israel. Unrest happening in Syria is not to make a democratic country but to replace legitimate President. US and its allies have succeeded to break diplomatic relation between Syria and Turkey. The main point of US and Arab League is to change Syrian regime because it will easily eliminate the military forces of Hizbullah in Lebanon supported by Iran. The failure of US and its allies to purpose human intervention in UN led to Israeli attack to Syrian region. The attack is to assist terrorist opposition to tackle the Syrian Government. A demise of the regime is to reduce an influence of Iranian strategic relations with Syria and to cut off Iranian support to Hizbullah facilitated by Syria because the Iranian nuclear capability is the most threat to Israel.

Keywords: *Syria, Geopolitics, Israel, Hizbullah, Timur Tengah, Iran, Libanon.*

Pergolakan yang terjadi di Suriah sejak Maret 2011 memiliki dampak atas strategi Suriah dalam menghadapi konflik dengan Israel. Dalam menghadapi Israel, Suriah telah terlibat perang dengan Israel pada tahun 1948, 1967 dan 1973 yang mengakibatkan didudukinya Dataran Tinggi Golan oleh Israel. Pada masa Presiden Hafiz al-Assad, Suriah juga terlibat perang dengan Israel secara tidak langsung pada tahun 1982, 1993 dan 1996 akibat serangan Israel ke Lebanon. Di masa Presiden Bashar al-Assad, Suriah meneruskan dukungannya kepada Hizbullah di Lebanon dan kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas, dan Jihad Islam.

Strategi ini membuat Suriah memiliki pengaruh atas perdamaian di kawasan. Seperti yang diutarakan oleh Henry Kissinger, bahwa “there can be no war in the Middle East without Egypt and no peace without Syria” (Drysdale dan Hinnebusch 1991, 2). Perdamaian dengan Israel dapat terwujud ada perdamaian antara Suriah dan Israel. Selain itu, Suriah berada di wilayah strategis berada di jantung Timur Tengah, perbatasan dengan Israel, Turki, Jordan, Irak dan Lebanon, berada di persimpangan Laut Tengah, dan Teluk Persia, serta antara benua Afrika dan Euroasia. Posisinya ini memudahkannya mendukung kelompok perlawanan dan dapat mengancam keberadaan Israel.

Dalam mewujudkan perdamaian, Suriah tidak saja melakukan konfrontasi dan perang dengan Israel tetapi juga melalui negosiasi. Suriah telah melakukan negosiasi dengan Israel pada masa Presiden Hafiz al-Assad dengan mediasi AS dari tahun 1991-2000, dan di masa Presiden Bashar al-Assad secara informal dengan Mediasi Turki. Presiden Bashar menyampaikan apresiasinya terhadap Turki dalam wawancara dengan Harian Qatar (*SANA* 21 Mei 2008), *Al-Watan*, bahwa “Erdogan’s role in the process and praised his efforts that intensified since April 2007”. Turki telah lima kali memfasilitasi perundingan informal antara Suriah dan Israel. Perundingan tersebut terhenti, karena serangan Israel ke Gaza akhir Desember 2008 dan tuntutan Israel agar Suriah memutuskan hubungan dengan Hizbullah, dan Hamas serta Iran jika pertemuan akan dilanjutkan ke arah yang lebih formal (Hadar 2007, 4).

Strategi Suriah dalam menghadapi Israel secara tidak langsung telah memperkuat ancamannya terhadap Israel. Seperti yang diutarakan oleh David W, Lesch (2007, 20) bahwa “Victory for Hizbullah was a victory of Syria. Bashar had very few strategic assets left as of early 2007, and Syrian Foreign Policy under Assad is all about having for quid pro quos, particularly regarding a return of the Golan Heights.” Strategi Suriah menghadapi Israel sebenarnya untuk menekan Israel agar melakukan negosiasi untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan. Hal ini berpengaruh atas kebijakan AS terhadap Suriah yang disampaikan oleh

Menlu AS, Colin L. Powel dalam pertemuannya dengan Presiden Bashar al-Assad bulan Mei 2003, bahwa Suriah harus menutup semua kantor organisasi teroris Palestina di Damaskus termasuk melucuti Hizbullah di Lebanon, dan mengusir pemimpinnya. Dalam hal ini ditanggapi oleh Presiden Bashar dalam wawancara dengan Arabiya TV tanggal 10 Juni 2003 bahwa "I believe that Palestinians are the people of the Intifada, so they can determine the form they want to liberate their land" (Rabil 2006, 140). Suriah memiliki prinsip bahwa gerakan Intifada tidak dapat dirintangi, karena hak rakyat Palestina untuk mencari bentuk dalam menghadapi Israel.

Dari strategi yang dilaksanakan oleh Suriah maka bagaimana dampak strategi Suriah dalam menghadapi Israel terhadap pergolakan yang terjadi di Suriah sejak Maret 2011? Keuntungan apa yang diperoleh oleh Israel jika Presiden Bashar al-Assad dapat dijatuhkan dari tumpuk kekuasaan di Suriah?

Geopolitik Suriah

Strategi Suriah dalam menghadapi Israel dikaji berdasarkan geopolitik yang diimplementasikan dalam kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konflik dengan Israel sesuai kondisi geografisnya. Alan Bullock dan Oliver Stallbrass (1977, 263) dalam *The Fontana Dictionary of Modern Thought* menjelaskan "By geopolitics, it understands that 'nations or states are engaged in a perpetual struggle for life...which can be derived from the study of geography and history and successfully applied to foreign policy.'" Secara umum geopolitik juga didefinisikan sebagai pandangan politik suatu negara yang diinspirasi dengan posisinya dalam peta. Menurut E.H. Carr dalam bukunya *Twenty Years Crisis*, menekankan bahwa geopolitik terkait dengan politik internasional, dan tidak terkait dengan faktor ideologi. Geopolitik menjadi dasar kebijakan untuk mencapai tujuan sesuai kondisi geografis negara tersebut dan bagian dari pemikiran tradisi realis internasional untuk mempertahankan pengaruhnya di suatu wilayah (Drulak 2006, 420-421).

Pemikiran geopolitik menurut Guntram H. Herb dalam tulisannya *the Politics of Political Geography* menjelaskan:

Political geography have engaged with states in three ways: ... to facilitate the process of maximizing its power over space; to maintain and manage its territorial existence; and to actively resist and question its spatially manifested actions (Drulak 2006, 430-51).

Dalam geopolitiknya, suatu negara akan berusaha memaksimalkan kekuatan atas wilayahnya yaitu negara sebagai aktor penting dalam

memanfaatkan posisi strategisnya dalam mempertahankan kepentingan keamanan nasional.

Tuntutan atas Mundurnya Bashar al-Assad

Pergolakan yang terjadi sejak awal Maret 2011 telah memakan korban jiwa hingga penulisan makalah hingga mencapai lebih dari 100.000 orang. Jatuhnya korban jiwa telah membuat reputasi Presiden Bashar jatuh di mata pemimpin-pemimpin dunia. Presiden Barack Obama pada 18 Agustus 2011 menuntut agar Presiden Bashar al-Assad mengundurkan dari kekuasaannya (Wilson and Warrick 2011). Digambarkan, bahwa pergolakan yang terjadi merupakan tuntutan dari rakyat Suriah untuk memulai demokrasi dengan perubahan rezim. Tuntutan agar Presiden Bashar mundur juga dikemukakan oleh Jerman, Perancis, dan Inggris ketika pada saat itu korban yang meninggal sebanyak 2000 orang. Menlu Perancis, Laurent Fabius pernah mengatakan, bahwa “Bashar must go to Bashar must Die” (*The Santos Republic* 2 September 2012). Tuntutan agar Presiden Bashar mundur dari kekuasaan merupakan harapan yang sudah ditunggu dalam pergolakan tersebut sebagai suatu tuntutan demokrasi.

Tuntutan demonstrasi muncul pada awal Maret 2011 saat sejumlah pemuda di Dar'a, sebelah Selatan ibu kota Damaskus, terinspirasi seperti yang terjadi di Tunisia, dan Mesir dengan menulis dengan kata-kata anti pemerintah di tembok sekolah mereka. Setelah itu, mereka ditangkap oleh kepala sekolah, dan dinas intelijen (*mukhabarat*) serta dipenjarakan (Starr 2012, 4). Pemerintah menanggapi demonstrasi tersebut dengan mengumumkan pembentukan komite investigasi pada 24 Maret 2011, dan Pemerintah Bashar memerintahkan agar seluruh demonstran yang ditahan dibebaskan. Pemerintah Suriah juga menetapkan, bahwa gaji pegawai pemerintah ditingkatkan 20-30 persen, pajak pendapatan dikurangi, dan dana pensiun ditingkatkan. Buthaina Shahban juru bicara pemerintah Suriah mengatakan “...relay the condolences of Presiden Bashar to the families of the victims (in Dar'a). Presiden Bashar cannot accept that even a single drop of blood is spilled. All legitimate demands will be met, but in a calm way” (*BBC* 25 Maret 2011). Pernyataan ini menjelaskan bahwa Suriah berupaya untuk mengantisipasi setiap tuntutan dari gerakan demontran dengan menawarkan reformasi politik.

Reformasi dilakukan oleh Suriah dengan diakhiri hukum darurat yaitu Dekrit No. 51, 9 Maret 1963. Presiden Bashar mengatakan “the emergency law is not used to suppress freedoms but to suppress terrorism, and there is a huge different. Frequently in the past this law was used in the wrong way” (Lesch 2012, 71). Dekrit ini kemudian

dibatalakan pada tanggal 19 April 2012, dan Pemerintah Suriah menghapuskan the Supreme State Security Courts. Secara teori pemerintah tidak dapat lagi menangkap, dan menahan tanpa adanya surat perintah dari lembaga yang berwenang. Dalam menghadapi demonstrasi, maka pada tanggal 7 Juli 2011, Pemerintah Suriah memberikan izin Duta Besar AS, Robert Ford, berkunjung ke Hama. Suriah ingin menyampaikan ke dunia internasional, bahwa pemerintahannya sangat peduli terhadap tuntutan demonstran. Bagi AS kunjungan tersebut memperlihatkan keseriusan dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah. Kalangan pro pemerintah merasa bahwa Pemerintah AS telah ikut campur dalam masalah dalam negeri Suriah, sehingga mereka melakukan demonstrasi.

Dukungan dan keterlibatan AS terhadap demonstrasi sangat jelas dengan kepemilikan senjata, dan peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para petani Sunni yang berada di desa padahal kehidupan mereka miskin. Menurut Stephen Starr (2012, 42) “...when Ambassador Robert Ford went to Hama, there were reports that he gave the protesters satellite phones and other things.” Kunjungan Dubes AS ke Hama diindikasikan oleh Pemerintah Suriah bertujuan untuk membantu gerakan oposisi yang dimulai dengan demonstrasi kemudian kerusuhan, dan ketidakstabilan di Suriah. Di lain pihak, AS juga melakukan hubungan dengan mantan Wakil Presiden Abdul Halim Khadam (yang melarikan diri ke Perancis, karena tidak sepaham dengan Presiden Bashar al-Assad) untuk dapat mengirimkan senjata kepada para kelompok pemberontak. Dukungan AS terhadap oposisi anti-rezim tidak saja melalui mantan pejabat tinggi Suriah tetapi juga melalui media. Menurut Stephen Starr (2012, 62) bahwa kawat Kedutaan Besar AS yang dikeluarkan oleh Wikileaks menjelaskan, bahwa Kemlu AS menyalurkan bantuan 6 juta dollar AS sejak tahun 2006 untuk mengoperasikan saluran satelit, dan mendanai sejumlah kegiatan.

Untuk mengantisipasi perang media, Pemerintah Suriah berhasil memblokir TV pro oposisi seperti Orient TV, Ugarite News, Sham Network News, Home Network News yang giat melakukan *upload* ke situs YouTube. Dalam menghadapi informasi negatif, Suriah adalah negara Arab pertama yang memiliki Syrian Internet Army yang berada pada jejaring nasional untuk melancarkan serangan kepada situ-situs yang anti pemerintah. Untuk menguatkan pengaruhnya maka dibuat Syrian Internet Army di Facebook untuk menghadirkan demonstran yang pro pemerintah. Pada bulan September 2011, situs tersebut telah berhasil menyerang situs Los Angeles Times dan Newsweek (Stars 2012, 52). Informasi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran realitas yang sebenarnya terjadi di Suriah dalam menghadapi propaganda negatif media Barat.

Propaganda yang dilancarkan oleh media AS, dan sekutunya termasuk negara-negara Arab untuk membuat pemberitaan yang negatif ditanggapi oleh salah satu jurnalis yang pernah diundang ke Suriah. Menurut Jonathan Steele, dalam harian *the Guardian*, 17 Juli 2011, menulis bahwa “Most Syrian Back Presiden Assad, But You’d Never Known From Western Media.” Ia menjelaskan bahwa dukungan terhadap Presiden Bashar masih cukup besar, dan hal ini sangat berbeda seperti yang dilaporkan oleh media Barat lainnya. Hal ini, karena ketakutan akan terjadi pergolakan besar menuju perang sipil yang semakin meluas tanpa disadari oleh para pengamat luar Suriah.

Dalam mengatasi pergolakan, Suriah mengadakan Pertemuan Konsultatif untuk Dialog Nasional Suriah pada tanggal 10-12 Juli 2011. Dr. Mohammed Habash seorang politisi, dan anggota parlemen menjelaskan, bahwa “The source of bullets that targeted Syrian citizens was identified, nevertheless, the source of bullets that targeted security and army men have not been yet identified” (Jasmine 2011). Hal ini terjadi, karena terdapat konspirasi dari luar untuk membuat ketidakstabilan di Suriah. Dalam mengatasi ini Suriah berupaya untuk mengatasinya dengan diadakan reformasi di berbagai bidang. Dalam kaitan ini Father Zahlawi mengatakan “the elections should be real elections and not dictations” (Jasmine 2011). Di samping itu, Suriah juga melakukan referendum mengenai konstitusi Suriah yang disetujui dengan jumlah suara 89 persen dari kehadiran 57,4 persen menurut angka Pemerintah Suriah. Dengan diamandemenkan konstitusi Suriah, maka pertama, telah mengizinkan sistem pemilu multi partai di parlemen. Pasal 8 yang menyatakan, bahwa Partai Ba’ath sebagai partai utama dalam masyarakat, dan negara telah diamandemenkan yaitu “The political system of the state shall be based on the principle of political pluralism, and exercising power democratically through the ballot box”; Kedua, Pasal 88 yang baru menyatakan “the President of Republic is elected for 7 years as of the end of the term of the existing President. The President can be elected for only one more successive term.” Pasal membatasi hanya dua kali dapat dipilih menjadi presiden dengan kurun waktu 7 tahun dalam satu periode presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat (pasal 86). Referendum ini merupakan kemajuan besar dalam pemerintah Bashar al-Assad.

Tuntutan AS dan sekutunya untuk menghancurkan kekuasaan Presiden Bashar hampir sama dengan pola menggulingkan Presiden Khadafi, dan Presiden Sadam Husein. Philip Giraldi (mantan agen CIA) mengatakan bahwa:

Iskenderum is also the seat of the Free Syrian Army, the armed wing of the Syrian National Council. French and British special forces trainers are on the ground, assisting the Syrian rebels while the CIA and U.S. Spec Ops (spesification and operations) are providing communications

equipment and intelligence to assist the rebel cause, enabling the fighters to avoid concentrations of Syrian soldiers (Gerald 2011).

Kekuatan oposisi yang telah dipersenjatai mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan sipil dan militer Suriah. Saat terjadi pembunuhan terhadap Saria Hassoun, anak Mufti Agung Suriah, Ahmad Badruddin Hassoun, dan seorang anak Kristen berumur 10 tahun pada bulan Oktober 2011 di Aleppo, para peziarah terdiri dari kalangan Sunni, Shi'ah, dan Kristen Orthodox. Pihak oposisi menuduh tentara Suriah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang tersebut, namun setelah dikonfirmasi oleh Siaran Televisi Suriah, ibunya mengatakan, bahwa yang membunuh anaknya adalah para kelompok bersenjata (Seale 2012). Pihak oposisi menanamkan persepsi, bahwa telah terjadi konflik antara Alawite (Shi'ah) yang dianut sebagian besar pejabat elit Pemerintah Suriah, dan kaum Sunni yang berjumlah sekitar 70 persen dari penduduk Suriah. Konflik sekte yang terjadi di Suriah menjadi pembenaran, bahwa pemerintah Bashar tidak melindungi kelompok lainnya.

Sebelum terjadinya pergolakan menurut laporan Kemlu AS tentang *the US State Department on Religious Freedom around the World* (2010) mengenai Suriah mengatakan bahwa "The constitution provides for freedom of faith and religious practice as long as religious rites do not disturb the public order." Laporan ini secara tidak langsung telah membenarkan, bahwa Suriah merupakan negara yang tidak mengajarkan terorisme dan tindakan ekstrimisme. Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang di Suriah, karena pernah melakukan pemberontakan tahun 1982 di Hama untuk menggulingkan Pemerintahan Hafiz al-Assad. Laporan menjadi dasar AS dan sekutunya membantu kelompok Ikhwanul Muslimin yang sebagian besar terwakilkan dalam Syrian National Council (SNC) yang dibentuk di Istanbul bulan Agustus 2011.

Organisasi SNC diketuai oleh George Sabra (Kurdi) dengan 420 orang anggotanya dan memiliki jaringan dengan Free Syrian Army di Suriah. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Intelijen AS, James Clapper yang mengatakan kepada Senate Armed Services Committee bulan Februari 2012, bahwa "al-Qaeda in Iraq (AQI) had probably already moved into Syria and may have carried out bombings in Aleppo and Damascus, attacks which carried the hallmarks of al-Qaeda Operation" (Smith 2012, 6). Sungguh ironis, bahwa al-Qaeda yang diperangi oleh AS di Afghanistan dan dituduh telah melakukan tindakan teror pada 11 September dan di Irak, dibantu untuk memerangi dan membantu pergolakan senjata terhadap Suriah.

Pecahnya Hubungan Strategis Suriah-Turki-Iran

Sebelum terjadinya pergolakan pemberontakan di Suriah, hubungan kerjasama Turki dan Suriah meningkat, tidak saja di bidang ekonomi tetapi juga mengarah pada kerjasama militer dan nuklir. Kerjasama ini menjadi suatu aliansi strategis, karena Turki merupakan anggota North Atlantic Treaty Organisation (NATO) bersama dengan Israel. Dengan adanya pergolakan yang terjadi Suriah pada awal Maret 2011 telah menyebabkan hubungan antara Suriah dan Turki menjadi renggang. Salah satu sebab merenggangnya hubungan ini adalah ketika PM Turki, Recep Tayyip Erdogan, menelpon Presiden Bashar al-Assad untuk mengizinkan agar para masyarakat Suriah diberikan izin untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas tanpa adanya pertumpahan darah (*Syriandays* 2011). Sikap ini dinilai oleh Suriah sebagai ikut campur dalam masalah dalam negerinya. Kejadian ini membuat kerjasama yang telah terjalin antara Suriah dan Turki terputus.

Kedua negara bahkan pernah berkolaborasi untuk membentuk suatu konferensi regional dalam menghadapi intervensi AS ke Irak yang meliputi Turki, Suriah, Mesir, Jordan, Saudi Arabia dan Iran. Di samping itu, Suriah dapat meredakan ketegangan antara Iran dan Turki akibat konfrontasi di Laut Kaspia pada Juli 2001 dengan partisipasi Iran dalam Konferensi Istanbul bulan Januari 2003. Hubungan kedua meningkat ditandai dengan persetujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi antara Deputy PM Suriah, al-Dardari dan Deputy PM Turki, Abdullatif Sener dalam kerjasama antara bank sentral. Menteri Dalam Negeri Suriah, Jenderal Bassam Abd al-Majid telah membentuk komite bersama dengan mitranya untuk mengimplementasi protokol anti terorisme (Tonkus 2009). Hubungan Suriah-Turki juga telah memperkuat hubungan Turki-Iran. Kedua negara telah mempertimbangkan untuk melakukan kerja sama dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (*Reuters* 13 Juni 2008).

Strategi kemitraannya Suriah dengan Turki dan Iran telah membawa peningkatan kekuatan militer dan ekonomi Suriah. Iran telah mengumumkan pada Juli 2007 untuk memberikan bantuan militer sejumlah 1 milyar dollar AS kepada Suriah dan kemudian bulan Januari 2008, pesawat pengangkut Iran membawa peluru artileri, alat eksplosif berkekuatan tinggi, dan peralatan persenjataan lainnya. Kerja sama ini telah memperkuat militer Suriah melalui latihan militer antar angkatan bersenjata Suriah-Turki pada April 2009. Sedangkan di bidang ekonomi, Turki menawarkan proyek investasi antara tahun 2005 dan 2007 senilai 150 juta dollar AS dan bahkan perdagangan bilateral meningkat dari 500 juta dollar AS tahun 2002 menjadi 1.5 milyar dollar AS tahun 2007, dan dua tahun kemudian meningkat 4 milyar dollar AS (Lawson 2013,

138-139). Peningkatan disebabkan, karena adanya perjanjian zona perdagangan bebas tahun 2008 dan kemudian diikuti oleh Iran pada tahun 2010.

Aliansi Suriah, Turki dan Iran telah membuat kekuatan besar di Timur Tengah dalam menghadapi Israel. Turki sebagai anggota NATO merupakan kekuatan militer yang dapat mengimbangi kekuatan militer Israel. Di segi ekonomi, segitiga zona perdagangan bebas akan meningkatkan arus barang komoditi di tiga negara, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pada bulan September 2010, Turki dan Suriah telah sepakat meningkatkan koordinasi di bidang keamanan dan pertahanan serta pertukaran informasi di bidang militer. Dari hubungan ini, Turki dapat menekan PKK dengan melakukan koordinasi dengan Suriah. Aliansi tiga kekuatan ini dapat memperkuat Suriah dalam menekan Israel. Di samping itu, hubungannya dengan Turki juga mengakhiri isolasi terhadap Suriah yang telah dianggap terlibat dalam pembunuhan mantan PM Rafik Hariri. Berkat hubungannya dengan Turki, maka Suriah memiliki kesempatan untuk mulai mengadakan negosiasi secara informal dengan Israel pada tahun 2008.

Kekuatan aliansi ini akhirnya pecah akibat terjadinya pergolakan di Suriah. Turki sebaliknya tidak mendukung reformasi di Suriah, sebaliknya justru mendukung tentara pembebasan Suriah untuk memerangi rezim Bashar al-Assad. Sungguh ironis, bahwa kedua negara dalam hubungan bilateral telah sangat dekat dari tahun 2002 hingga 2010 tetapi kemudian memusuhi Suriah dan membantu kelompok terorisme di Suriah. Padahal hubungan Turki dan Suriah meningkat tajam ketika tentara Israel menyerang kapal Flotila Turki yang menuju ke Gaza untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan. Saat itu, Turki menyadari, bahwa hubungannya dengan Israel tidak membawa kebaikan dan kemudian Turki beralih untuk membantu kelompok Palestina. Iran menyambut baik kebijakannya ini dan bersedia untuk membantu Turki mengadakan pengawalan terhadap kapal tersebut. Hubungan antara Turki dan Iran memanas ketika NATO akan menempatkan stasiun radar anti rudal balistik di Turki. Iran mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menimpali balik anti rudal tersebut.

Memburuknya hubungan Suriah-Turki mengakibatkan Iran mencari kesempatan untuk memperkuat hubungan dengan Suriah. Berkat tekanan Iran, Irak memberikan bantuan dana sebesar 10 juta dollar untuk membantu rezim Bashar al-Assad. PM Irak Nouri al-Maliki pernah mengatakan, bahwa penggantian rezim oleh kekuatan luar akan mengulang perjanjian Sykes-Picot untuk memecah Timur Tengah menjadi negara-negara yang lemah (*SANA* 25 Juni 2013). Pergolakan di

Suriah merupakan keuntungan bagi Israel, karena dapat memecahkan aliansi strategis antara Suriah-Turki-Iran-Irak. Turki menjadi kekuatan utama di Timur Tengah dapat menjadi penghalang bagi Israel bila aliansi tersebut masih tetap berlanjut. Israel tentunya akan sangat ingin membatasi kekuatan Iran di kawasan Timur Tengah.

Hubungan antara Suriah dan Turki juga meningkatkan posisi Hamas. Suriah juga mampu untuk meningkatkan peran Hamas dengan adanya dialog antara Turki dengan Hamas khususnya setelah terjadi penyerangan kapal Flotila ke Gaza oleh Israel, 31 Mei 2010, yang mengakibatkan tewasnya 9 orang Turki. Dalam hal ini hubungan antara Turki dan Suriah memiliki arti strategis dalam menghadapi Israel. Kepentingan Suriah untuk membantu diplomasi Hamas dapat difasilitasi, dan masalah isu nuklir Iran dapat diatasi oleh Turki sebagai mediasi dengan AS. Kondisi ini tentunya sangat mengganggu lobi Israel ke AS yang ingin menghilangkan kemampuan nuklir Iran. Kuatnya hubungan ini membuat sulitnya Israel untuk bersikap keras terhadap Iran yang didukung Turki untuk mencari solusi damai dalam masalah nuklir Iran.

Tekanan Liga Arab Terhadap Suriah

Dalam pergolakan yang terjadi, Suriah mendapatkan tekanan Liga Arab. Kebijakan Liga Arab merupakan dijadikan perantara, dan legalitas AS untuk menghadapi Pemerintah Bashar. Liga Arab dengan suara bulat menyerukan, agar diterapkan *non-fly zone* atau zona larangan terbang. Keputusan ini disambut baik oleh AS, sehingga semakin melegalkan upayanya untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Dalam interview dengan TV al-Ikhbariya, 18 April 2013, Presiden Bashar menekankan, bahwa "The West has paid heavily for funding al-Qaeda in its early stages... it is doing the same in Syria, Libya, and other places. From the first day, what is happening in Syria is dictated from abroad" (Perez 2013). Keanggotaan Suriah di Liga Arab pada tanggal 12 November 2012 untuk sementara dibekukan, dan Menlu Qatar sebagai Ketua Liga Arab mengatakan, bahwa pembekuan tersebut merupakan sanksi terhadap Suriah yang sebelumnya juga telah mendapatkan sanksi ekonomi.

Untuk memperkuat pengaruhnya, Liga Arab bekerja sama dengan PBB dan pada Februari 2012 menujuk Kofi Annan sebagai utusan khusus berdasarkan UN-Arab League Joint Special for Syria (JSE) atas kesepakatan Sekjen PBB Ban Ki Moon dan Sekjen Liga Arab Nabil El Arabi. Dalam perkembangannya Utusan PBB, Kofi Annan ternyata tidak mampu membawa perubahan di Suriah, sehingga ia menyatakan mundur pada bulan Agustus 2012. Tindakan ini kemudian juga

dipertegas oleh Menlu AS, Hilary Clinton, bahwa “he has lost legitimacy, Presiden Assad is not indispensable and we absolutely responsibility nothing invested him remaining in power. Our goal is to see that the will of the Syrian people for a democratic transformation occurs” (*BBC News* 11 Juli 2011). Pemerintah Suriah melalui Syrian Arab News Agency (SANA) menanggapi, bahwa “Syria strongly condemn the statement of the American Foreign Minister..... The legitimacy is not based on the United States or others, it stems from the will of the Syrian people” (Lesch 2012, 157). Suriah menggambarkan bahwa AS menggunakan PBB dan Liga Arab untuk mendukung kepentingannya dalam menjatuhkan kepemimpinannya.

Bagaimana mungkin tuntutan Kofi Annan untuk melakukan genjatan senjata dapat dipenuhi oleh Suriah, sedangkan AS dan sekutunya mempersenjatai para teroris untuk memerangi Suriah seperti yang terjadi di Libya. Liga Arab kemudian menunjuk Lakdar Brahimi menggantikan Kofi Annan yang diharapkan dapat menjadi mediasi dalam penyelesaian pergolakan di Suriah. Kenyataannya bahwa Arab Saudi dan Qatar justru menjadi tangan kanan AS untuk menghancurkan Suriah. Ironisnya negara monarki otoriter seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar dan Jordania membantu menjatuhkan negara sosialis Suriah dengan dalil untuk membentuk negara demokrasi.

Intervensi Militer Israel ke Suriah

Tidak dapat dipungkiri, bahwa Suriah merupakan negara Arab terdepan dalam mendukung perjuangan kelompok perlawanan Palestina, dan Hizbullah dalam menghadapi Israel. Dalam pergolakan ini, secara tidak langsung Israel sangat diuntungkan, karena Ketua Biro Politik Hamas Khaled Mash'al telah meninggalkan Damaskus pada 1 Januari 2012, sehingga akan menyulitkan Suriah untuk melakukan koordinasi dengan Hamas. Kehadiran Hamas di Suriah pada tahun 2001 dari Qatar adalah, karena komitmennya Suriah dalam membela rakyat Palestina. Hamas merasa menempati rumahnya sendiri di Damaskus, karena diberikan fasilitas oleh Pemerintah Suriah, termasuk keamanan dirinya.

Ketua Biro Politik Hamas, Khaled Mash'al, pada 25 September 1997, pernah mengalami percobaan pembunuhan yang diperintahkan oleh Menteri Pertahanan Israel, Benjamin Netanyahu di Amman, Jordan. Pada Maret 2003, Menlu AS Colin Powell pernah meminta kepada Presiden Bashar untuk mengusir Ketua Biro Politik Hamas, sebagai komitmen Suriah dalam memerangi tindak terorisme. Upaya ini tidak berhasil, karena Suriah tidak merasa mendukung terorisme tetapi melindungi kelompok perlawanan. Dengan perginya Hamas dari Suriah, maka hal ini merupakan salah satu kemenangan besar bagi Israel.

Khaled Mash'al termasuk warga Palestina yang paling penting untuk menjadi sasaran pembunuhan. Hamas merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap Israel di Jalur Gaza yang hingga kini masih belum dapat dihancurkan, dan dianggap menjadi ancaman serius bagi negara Israel.

Israel berupaya untuk menghilangkan ancaman dengan membantu pergolakan yang ada di Suriah secara tidak langsung melalui sekutunya AS. Pergolakan di Suriah adalah kemenangan Israel untuk mengalihkan perhatian kelompok perlawanan Hizbullah. Konsentrasi kelompok ini adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan Presiden Bashar dengan membantu pasukan militer Suriah. Secara tidak langsung, konsentrasi dana, dan kemampuan militer Hizbullah akan cenderung melemah, sebaliknya Israel pasti akan terus mencari kelemahan Hizbullah agar suatu saat dapat dihancurkan seperti serangan Israel ke Lebanon yang terjadi bulan Juni 2006.

Upaya Israel untuk membantu kelompok pemberontak adalah melalui serangan kekuatan udara Israel ke Suriah pada 30 Januari 2013. Hingga saat ini upaya intervensi militer yang akan dilakukan melalui PBB telah digagalkan oleh Rusia, dan China, maka upaya untuk membantu, dan memperkuat pihak oposisi adalah melalui kekuatan angkatan udara Israel. Serangan udara tersebut juga memperlihatkan kepada sekutunya AS, bahwa kekuatan angkatan udara Suriah tidak sebaiknya angkatan udaranya. Dukungan Israel juga diperhalus dengan alasan menggempur konvoi truk yang membawa persenjataan dari Suriah ke Damaskus. Ada analisis mengatakan mengapa Suriah harus mengirim persenjataan ke Hizbullah ketika negaranya dalam keadaan bahaya, dan memerlukan persenjataan tersebut. Menurut pasukan pemberontak di perbatasan Suriah-Lebanon pada Reuters, bahwa tidak ada serangan diperbatasan, serangan Israel hanya ditujukan pada pusat penelitian militer Suriah di Jaramaya (Evans dan Oweis 2013).

Pusat penelitian militer ini telah berkali-kali berusaha dihancurkan oleh kelompok oposisi namun tidak berhasil. Dalam kaitan ini, pasti sebenarnya ada komunikasi antara kelompok pemberontak Suriah dengan Pemerintah Israel, karena tujuan dari serangan adalah sama. Serangan tersebut adalah upaya Israel untuk membantu, dan memperkuat perjuangan pemberontak melawan Pemerintah Suriah. Presiden Bashar mengatakan "the Syrian crisis had been prompted by forces outside the country, in particular al-Qaida fighters....We have here al-Qaeda with fighters from 80 countries" (*Jerusalem Post* 10 Oktober 2013). Lebih dari dua tahun kekuatan pemberontak tidak dapat menghancurkan Pemerintah Suriah dan Israel menginginkan agar Presiden Bashar dapat segera jatuh dan digantikan dengan rezim yang sepaham dengan kebijakan AS.

Serangan Israel kedua juga ditujukan untuk membantu kepada kelompok teroris di Suriah 5 Mei 2013. Alasan Israel sama dengan serangan sebelumnya yaitu menyerang konvoi persenjataan yang akan disampaikan kepada Hizbullah. Kantor Berita SANA 6 Mei 2013 menerangkan, bahwa serangan Israel berada di tiga tempat yaitu Timur Laut kota Jamraya, kota Maysaloun di perbatasan, dan dekat pangkalan udara Damaskus. Tempat-tempat tersebut merupakan pusat kekuatan kelompok pemberontak yang bertahan terhadap serangan pasukan Pemerintah Suriah. Meskipun AS menyangkal adanya serangan tersebut. Juru bicara Gedung Putih mengatakan “The president many times has talked about his view that Israel, as a sovereign government, has the right to take the actions they feel are necessary to protect their people” (*Reuters* 5 Mei 2013). Kalimat ini menandai, bahwa sebelum terjadinya serangan sudah ada pembicaraan antara Israel dan AS atau belum ada pembicaraan, tetapi AS harus membenarkan tindakan tersebut.

Pejabat pada Kemlu Urusan Strategi, dan Intelijen, serta Hubungan Internasional Israel, Yuval Stenitz mengatakan, bahwa Israel tidak pernah mendesak AS untuk melakukan tindakan militer terhadap Suriah. Sebaliknya justru Israel yang melakukan serangan militer ke Suriah. Tujuannya adalah melemahkan posisi kekuatan militer pemerintah Bashar dalam menghadapi teroris oposisi. Israel juga ingin mempertegas bahwa AS perlu melakukan intervensi, karena intervensi kemanusiaan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB telah diveto oleh Rusia dan China. Serangan tersebut memiliki dua tujuan pertama memperkuat oposisi melawan Pemerintah Suriah; kedua, menarik perhatian Iran, dan Hizbullah untuk menyerang kembali Israel, sehingga ada pembenaran bagi Israel untuk kembali menghancurkan Hizbullah, dan sekaligus Iran sebagai ancaman atas nuklirnya. Seperti yang disampaikan *neoconservative* Charles Krauthammer mengakui, bahwa “it’s not just about freedom, it’s really about undoing the regime in Iran” (Wallerstein 2012). Pengaruh Iran sangat dominan di Suriah telah membuat ancaman luar biasa bagi Israel. Hal yang paling ditakuti adalah bila Iran melakukan tranfer teknologi nuklir ke Suriah, dan Hizbullah kemudian ke Hamas, maka Israel akan lenyap dari bumi Palestina.

Simpulan

Pergolakan di Suriah telah memberikan dampak atas melemahnya pengaruh Suriah di Timur Tengah dalam menghadapi Israel. Dampak yang paling nyata adalah tuntutan atas mundurnya Bashar al-Assad dari kekuasaan yang diperjuangkan oleh AS dan Liga Arab. Tuntutan

mundur ini diupayakan agar dengan kepemimpinan baru di Suriah dapat memutuskan hubungan dengan Iran dan Hizbullah. Penyerangan Israel ke Suriah merupakan indikasi dukungan Israel untuk menggulingkan Presiden Bashar. Walaupun pergolakan yang terjadi juga telah memutuskan hubungan dengan Turki, tetapi masalah nuklir Iran merupakan ancaman terbesar bagi Israel bila nuklir tersebut berada di tangan Suriah, atau Hizbullah.

Daftar Pustaka

Buku

- Bullock, Alan, Stallybrass, dan Oliver, 1977. *The Fontana Dictionary of Modern Thought*. London: Fontana Books.
- Drysdale, Alasdair & Hinnebusch, dan Raymond A., 1991. *Syria and the Middle East Process*. New York: Council on Foreign Relations Press.
- Lawson, Fred.H,2013. *Global Security Watch Syria*, California: ABC-CLIO, LLC.
- Lesch, W. David, 2012. *The Fall of the House of Assad*. New Haven: Yale University Press.
- Rabil, Robert G, 2006. *Syria, The United States, and The War on Terror in the Middle East*. Westport: Praeger Security International.
- Starr, Stephen, 2012. *Revolt in Syria: Eye-Witness to The Uprising*, New York: Columbia University Press.

Artikel Jurnal

- Drulak, Petr, 2006. "Between Geopolitics and Anti-Geopolitics: Czech Political Thought", *Geopolitics*, **11** (3): 420-438.

Media Online

- BBC, 2011. "Syria Unrest: Government Pledges Political Reforms" [online]. dalam www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12853634. [diakses 30 April 2013].
- Evans, Dominic & Oweis, dan Khaled Yacoub, 2013. "Israel Hits Syrian Army Convoy to Lebanon" [online]. dalam www.reuters.com/israel/hits/syrian/army/convoy. [diakses 23 Mei 2013].
- Geraldi, Philip, 2011. "NATO vs. Syria" [online]. dalam <http://www.theamericanconservative.com/articles/nato-vs-syria/>. [diakses 30 Mei 2013].

- Hadar, Leon, 2007. "Time To Talk to Syria" [online]. Dalam <http://nationalinterest.org/commentary/reporter-at-large-time-to-talk-to-syria-1789>. [diakses 24 April 2010].
- Jasmine, Roman, 2011. "Diary from Syria: Consultative Meeting of Syria National Dialogue" [online]. dalam Emaj Magazine <http://emajmagazine.com/2011/07/18/diary-from-syria-consultative-meeting-of-syria>. [diakses 26 April 2013].
- Jerusalem Post, 2013. "Israel may be behind Syrian chemical weapons use" [online]. dalam <http://www.jpost.com/Middle-East/Israel-may-be-behind-Syrian-chemical-weapons-use-312051>. [diakses 6 Mei 2013]
- Reuters, 2008. "Turkey, Syria eye nuclear energy cooperation – agency" [online]. dalam www.uk.reuters.com/article/2008/06/13/turkey-syria-energy. [diakses 17 September 2013].
- SANA, 2008. "Syria and Israel start indirect peace talks under Turkish Sponsorship" [online]. dalam <http://www.sana.sy/ara/2/2008/05/21/175419.htm>. [diakses 17 Februari 2010].
- Steele, Jonathan, 2012. "Most Syrian Back Presiden Assad, but You'd Never Known From Western Media" [online]. Dalam www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jan/17/syrians-support-assad-western-propaganda. [diakses 26 Februari 2013].
- Syriandays, 2011. "President al-Assad receives phone call from Turkish Prime Minister" [online]. dalam http://www.syriandays.net/?page=show_det&select_page=2&id=285. [diakses 9 September 2013].
- The Santos Republic, 2012. "The Brahimi Real Plan: 'Bashar al-Assad Must Die'" [online]. dalam <http://thesantosrepublic.com/article/129964>. [diakses 15 Juli 2013].
- Wilson, Scott & Warrick, dan Joby, 2011. "Syria's Assad must go, Obama says" [online]. dalam http://articles.washingtonpost.com/2011-0818/politics/35271355_1_syrian-government-assets-syrian-president-bashar-al-assad-syrian-people. [diakses 22 September 2013].

Laporan

- Department of State-Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2010. *International Religious Freedom Report for 2010*. Washington D.C.: U.S. Department of State.
- Lesch, W. David, 2007. "Missed Opportunity: Cooperation and Confrontation in the U.S–Syrian Relationship" [online]. dalam www.tcf.org/publications/internationalaffairs/lesch_syria.pdf. [diakses 7 Juli 2010].
- Seale, Patrick, 2012. "The Syrian Crisis and the New cold War, Washington Report on the Middle East Affairs" [online]. dalam

- www.wrmea.org/380-wrmea-archives/washington-report-archives-2011-2015/march-april-2012/11092-two-views-the-crisis-in-syria.html. [diakses 21 Juni 2012].
- Smith, Ben, 2012. "The Syrian Crisis-Update May 2012, 9 May 2012, Library-House of commission", *SNIA/6271*, International Affairs and Defense Section.
- Tonkus, Selen, 2009. "Turkish-Syrian Crisis of 1998 and Its Aftermath: A Constructivist Approach ORSAM Middle East Research Assistant" [online]. dalam www.orsam.org.tr/en/showArticle.aspx?ID=201. [diakses 15 September 2013].
- Wallerstein, Immanuel, 2012. "The Syrian Impass, Washington Report on Middle East Affairs" [online]. dalam <http://www.wrmea.org/wrmea-archives/380-washington-report-archives-2011-2015/march-april-2012/11092-two-views-the-crisis-in-syria.html>. [diakses 13 Mei 2013].